

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Selly Selviana Eva Rumbekwan
NPP 31.1061

*Asdaf Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
Program Studi Studi Kebijakan Publik, Fakultas Politik Pemerintahan
Email: evarumbekwan20@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Hardiyanto Rahman, S.IP.M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Poverty is a complex issue faced by various countries, including Indonesia. In the Papua Highlands Province of Jayawijaya Regency, the poverty rate remains relatively high. **Objective:** This study aims to understand how the Social Assistance Policy is implemented in Jayawijaya Regency, identify the supporting and inhibiting factors in its implementation, and determine the efforts made by the government to support the implementation of the Social Assistance Policy. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The study employs Thomas R. Dye's theory with dimensions of Implementing Organization, Budget, Implementation Regulations, Human Resources, and Technological Resources. **Results/Findings:** The findings indicate that the Implementing Organization dimension has been effectively empowered. However, the Budget dimension has not been well-executed due to discrepancies in budget allocation for the implementation of social assistance policies sourced from the Jayawijaya Regency budget. The Implementation Regulations dimension has been functioning well according to existing SOPs, while the Human Resources dimension has not been effectively managed due to a lack of personnel in the implementation of Social Assistance. The Technological Resources dimension has been successfully utilized, as the Social Assistance Policy can be communicated through technological advancements such as the use of bank accounts for distributing financial aid, social media, radio broadcasts, and correspondence. Efforts made include socializing the Social Assistance program to the public to ensure they understand the procedures and requirements, as well as fostering collaboration between the Social Affairs Office, sub-districts, and the Post Office to support the distribution of social assistance to the community. **Conclusion:** The implementation of the Social Assistance Policy in Jayawijaya Regency has shown some successes and challenges that require further attention to enhance its effectiveness.

Keywords: Poverty, Social Assistance, Policy Implementation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Jayawijaya, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasinya serta mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Thomas R. Dye dengan Dimensi Organisasi Pelaksana, Anggaran, Peraturan Pelaksana, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Teknologi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan pada Dimensi Organisasi Pelaksana telah diberdayakan dengan baik, dimensi Anggaran belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya ketidaksesuaian anggaran dalam implementasi kebijakan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Jayawijaya, peraturan Pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku, dan sumber daya manusia belum berjalan dengan baik karena adanya kekurangan SDM dalam pelaksanaan Bantuan Sosial. Dimensi sumber daya lainnya berupa teknologi telah berjalan dengan baik karena Kebijakan Bantuan Sosial dapat diinformasikan melalui perkembangan teknologi yang semakin berkembang seperti penggunaan rekening bank dalam penyaluran Bantuan Sosial berupa uang, media sosial, penyiaran radio, dan surat-menyurat. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Bantuan Sosial agar masyarakat memahami bagaimana prosedur dan persyaratan Bantuan Sosial serta melaksanakan kolaborasi antara Dinas Sosial kepada Kecamatan dan Kantor Pos dalam mendukung jalannya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial di Kabupaten Jayawijaya telah menunjukkan beberapa keberhasilan dan kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci: Kemiskinan, Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan desentralisasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan (Alba & Kurniawan 2019). Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara otoritas pemerintah pusat dan kewenangan pemerintahan daerah dalam bentuk pembagian kekuasaan, keseimbangan sumber daya keuangan, dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pelaksanaan pemerintahan ini merupakan proses penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam penerapan kebijakan publik, tindakan individu atau kelompok diatur untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat adalah memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Papua melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dibandingkan dengan kewenangan otonomi daerah biasa, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan khusus ini mencakup berbagai bidang, seperti pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, Provinsi Papua diberi wewenang khusus dalam bidang pembangunan sumber daya manusia untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial di Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 19% pada tahun 2002 menjadi 1,5% pada tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam laporan Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security (World Bank, 2023). Penurunan persentase kemiskinan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia (dalam juta jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
Maret 2022	26,16	9,54%
September 2022	26,36	9,57%
Maret 2023	25,90	9,36%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yang menggembirakan. Pada Maret 2023, tercatat 25,90 juta orang penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan September 2022 (26,36 juta orang) dan Maret 2022 (26,16 juta orang). Lebih rinci, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 9,36%, turun 0,21% dari September 2022 dan 0,18% dari Maret 2022. Tren positif ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia mulai membuahkan hasil. Meskipun demikian, masih terdapat 25,90 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai target pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua (dalam juta jiwa)

Periode	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
September 2022	93,632	26,8%
Maret 2023	91,515	26,03%

Sumber: CNBC, 2023

Provinsi Papua mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,77% poin dari September 2022 hingga Maret 2023. Namun, Provinsi Papua masih termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan terbesar di Indonesia. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tren penurunan kemiskinan ini.

Provinsi Papua telah diberikan kewenangan khusus untuk mengatur wilayahnya berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Kebijakan Otonomi Khusus Papua telah berjalan selama 20 tahun, namun sektor kesejahteraan rakyat dalam hal kemiskinan belum mengalami perubahan yang signifikan. Kehidupan masyarakat di Papua masih memprihatinkan karena masih banyak yang hidup dalam keterbelakangan. Penerimaan dana otonomi khusus Papua bertujuan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dana otonomi khusus digunakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, serta memberikan pemerataan pembangunan dengan provinsi lainnya (Media Indonesia, 2021).

Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus mengatur pembagian dana berdasarkan porsi setiap provinsi. Ibu kota provinsi menerima 20% karena pembangunan, pendidikan, dan kesehatan sudah lebih terarah kepada kemajuan teknologi. Sebesar 80% dana dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki persentase kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Lanny Jaya menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 76,46 ribu jiwa, Kabupaten Jayawijaya sebanyak 75,59 ribu jiwa, dan Kabupaten Yahukimo sebanyak 71,61 ribu jiwa per tahun 2022. Tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua masih tergolong tinggi dan belum menurun secara optimal, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (ribu)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Jayawijaya	81,71	78,18	75,59
Yahukimo	71,76	73,62	71,61
Pegunungan Bintang	23,03	23,38	23,50
Tolikara	44,88	48,16	47,13
Nduga	36,54	41,17	41,76
Lanny Jaya	68,63	76,75	76,46
Mamberamo Tengah	17,72	19,66	19,66
Yalimo	20,84	22,32	21,72

Sumber: BPS Jayawijaya, 2023 - Diolah Penulis

Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, Kabupaten Jayawijaya termasuk peringkat kedua dengan kemiskinan tertinggi per tahun 2022 setelah Kabupaten Lanny Jaya dan disusul oleh Kabupaten Yahukimo. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah agar lebih berupaya dalam menanggulangi tingginya kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia, terdapat beberapa kesenjangan (gap) yang perlu diperhatikan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu gap utama adalah kurangnya perhatian terhadap integrasi dan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Nur Handayani dkk. (2023) menunjukkan adanya masalah dalam sinkronisasi data dan standar kemiskinan antara tingkat pusat dan daerah, yang menghambat efektivitas program. Namun, penelitian tersebut belum sepenuhnya mengeksplorasi bagaimana strategi integrasi yang efektif dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini secara holistik.

Selain itu, banyak penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh Achmad Zulfikri Sumantri (2022) dan Juli Panglima Saragih (2015). Pendekatan ini memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, tetapi sering kali kurang memberikan analisis mendalam mengenai dampak kebijakan tersebut dalam jangka panjang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan metode yang lebih beragam, seperti studi longitudinal atau pendekatan kuantitatif yang dapat memberikan data empiris lebih kuat.

Terakhir, penelitian sebelumnya juga cenderung berfokus pada aspek internal kebijakan, seperti faktor anggaran, koordinasi, dan sumber daya manusia. Namun, kurang banyak penelitian yang meneliti peran dan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Misalnya, penelitian oleh Rosmaida dkk. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat merupakan faktor pendukung, tetapi belum cukup menggali bagaimana partisipasi masyarakat luas dapat dioptimalkan untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dan bagaimana meningkatkan keterlibatan mereka dalam upaya pengentasan kemiskinan (Bogdan & Taylor, 2013).

1.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia (Dye, 2013). Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Achmad Zulfikri Sumantri pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Pengentasan Kemiskinan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam pengentasan kemiskinan serta mengidentifikasi

faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep sudah berjalan efektif, terlihat dari tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan selama tiga tahun terakhir. Faktor pendukungnya meliputi sumber daya manusia yang baik dan fasilitas yang memadai, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam tertib administrasi (Pahleviannur et al., 2022).

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Handayani, Riza Risyanti, Suripto, dan Fernandes Simangungsong pada tahun 2023 dengan judul "Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep "collaborative governance" dalam pengentasan kemiskinan di Bangkalan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan strategi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "collaborative governance" di Bangkalan belum efektif karena belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin. Penelitian ini menekankan perlunya penyamaan persepsi tentang standar kemiskinan di tingkat pusat dan daerah serta sinkronisasi data masyarakat miskin secara periodic (Nuradhawati, 2019).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Juli Panglima Saragih pada tahun 2015 dengan judul "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif solusi kebijakan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di DIY. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY perlu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha, serta meningkatkan anggaran baik dari negara maupun daerah. Perlindungan terhadap kelompok miskin dan pengembangan potensi ekonomi lokal juga menjadi fokus penting (Saragih, 2015).

Penelitian keempat dilakukan oleh Niken Larasati pada tahun 2017 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor content dan context yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan seperti jumlah anggaran dan sumber daya manusia yang minim, kurangnya koordinasi antar pihak, serta masyarakat miskin yang sulit mengakses layanan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Rosmaida, Agustinus Sudi, dan Yusuf Daud pada tahun 2021 dengan judul "Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tawalian". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin serta faktor pendukung dan penghambatnya di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin meliputi perencanaan, pendataan, dan pendampingan belum dilakukan dengan baik karena kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dan pendataan yang tidak profesional. Faktor pendukungnya adalah ketersediaan anggaran dan partisipasi tokoh masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang terbatas (Sumantri, 2022).

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran

dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Hasil-hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui integrasi sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat implementasi kebijakan dari sudut pandang internal dan terpisah antara tingkat pusat dan daerah, penelitian ini akan menggali strategi integrasi yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik dalam mengatasi ketidaksinkronan data dan standar kemiskinan, serta meningkatkan efisiensi program pengentasan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan (Larasati, 2017).

Selain itu, penelitian ini menggabungkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya menggunakan metode kualitatif. Dengan mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, tetapi juga menyediakan data empiris yang kuat untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam jangka panjang. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan kebijakan di masa mendatang (Handayani, Risyanti, & Simangungsong, 2023).

Kebaruan ilmiah lainnya yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah fokus pada peran dan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat luas, bukan hanya tokoh masyarakat, dapat dioptimalkan untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan memahami dinamika partisipasi masyarakat dan mencari cara untuk meningkatkan keterlibatan mereka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif dan inklusif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Otonomi Khusus dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dengan adanya kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah, penelitian ini ingin mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi dana otonomi khusus terhadap pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya (Handayani, 2021).

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Penelitian ini akan mengkaji berbagai variabel seperti akses terhadap

pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang mungkin berperan dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Otonomi Khusus. Melalui analisis data dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, penelitian ini akan menyusun saran-saran praktis yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan publik yang lebih baik dan berkelanjutan bagi Provinsi Papua Pegunungan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Bogdan dan Taylor (2013), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau penulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan induktif digunakan dalam penelitian ini, di mana data yang diperoleh dari lapangan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara mendalam.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mencakup beberapa dimensi utama, yaitu organisasi pelaksana, anggaran pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Setiap dimensi ini dioperasionalkan melalui indikator-indikator yang spesifik, seperti pembentukan organisasi baru, pendapatan dan belanja, kejelasan SOP, rekrutmen, dan ketersediaan infrastruktur. Peneliti menggunakan teori dari Thomas R. Dye (2017) sebagai dasar untuk mengembangkan operasionalisasi konsep ini, dengan tujuan mempermudah proses penelitian dan memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan target penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari buku, laporan pemerintah, artikel, dan dokumen lainnya. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, di mana informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Informan yang terlibat meliputi kepala dinas sosial, kepala bidang penanggulangan bantuan sosial, camat Wamena Kota, TKSK Kabupaten Jayawijaya, dan masyarakat penerima bantuan sosial.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan alat pendukung seperti media tulis dan elektronik. Peneliti bertanggung jawab atas pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, sedangkan catatan lapangan digunakan untuk mencatat informasi tambahan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Alat pendukung seperti bolpen, buku, handphone, dan laptop digunakan untuk mendokumentasikan data yang dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di

lapangan secara sistematis. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lisan dari narasumber yang dipilih. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang tersimpan dalam bentuk catatan, surat, arsip foto, dan jurnal kegiatan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang meliputi pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan adalah bagian integral dalam sebuah laporan penelitian, di mana data dan temuan penelitian disajikan secara objektif, dan interpretasi serta makna dari temuan tersebut diuraikan. Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 17 Tahun 2021.

Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial

Implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Jayawijaya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Kebijakan ini ditetapkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan teori DYE, implementasi kebijakan ini memerlukan evaluasi yang melibatkan berbagai aspek, seperti organisasi pelaksana, anggaran, dan sumber daya manusia.

Organisasi pelaksana memainkan peran krusial dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya merupakan organisasi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, terdapat kebutuhan untuk pembentukan organisasi baru di distrik untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Namun, perbedaan pandangan antara distrik dan dinas sosial mengenai penambahan tugas dan fungsi menghambat kerjasama dan komunikasi antar organisasi.

Pembentukan Organisasi Baru

Pembentukan organisasi baru di distrik diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan bantuan sosial. Namun, observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ada kendala dalam kerjasama antar organisasi. Misalnya, data penduduk yang tidak seragam di berbagai organisasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara organisasi pelaksana agar penyaluran bantuan sosial lebih efektif.

Anggaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Sumber pembiayaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, realisasi pendapatan mencapai Rp. 1.655.931.938.908,25 dan realisasi belanja daerah mencapai Rp. 1.740.809.578.948.

Anggaran yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp. 29.063.985.000. Namun, terdapat perbedaan data antara Dinas Sosial dan BAPPEDA yang menyebabkan anggaran tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh Dinas Sosial. Hal ini

mengakibatkan penyaluran bantuan sosial tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sinkronisasi data antara organisasi terkait agar anggaran yang dialokasikan dapat tepat sasaran.

Penerapan SOP yang jelas dan terdokumentasi penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Dinas Sosial telah menerapkan SOP dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk validasi data penerima bantuan dan koordinasi dengan pihak bank untuk memastikan bantuan diterima oleh yang berhak. SOP ini membantu menghindari penyalahgunaan bantuan dan memastikan transparansi dalam penyalurannya. Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam proses implementasi kebijakan. SDM yang kompeten dan memadai akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

Dinas Sosial mengalami kekurangan SDM, yang menghambat pelaksanaan kebijakan dengan cepat dan efektif. Proses rekrutmen dibatasi oleh kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selain itu, pengembangan SDM dilakukan melalui sosialisasi, studi banding, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.

Diskresi dan Pemberian Sanksi

Diskresi digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya menggunakan diskresi untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan SOP yang ada, meskipun terdapat perbedaan data dengan BAPPEDA. Sementara itu, pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan belum pernah dilakukan, namun sanksi yang ada disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial yang bersumber dari APBN di Kabupaten Jayawijaya, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang signifikan. Faktor penghambat utama meliputi belum optimalnya pembaharuan data penduduk penerima bantuan sosial, keterbatasan dalam penyediaan E-KTP, minimnya sarana dan prasarana, serta belum adanya kolaborasi Satu Data. Pembaharuan data yang tidak konsisten seringkali menyebabkan ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan, mengakibatkan adanya penerima yang tidak sesuai dengan kriteria atau sebaliknya. Selain itu, kurangnya E-KTP menyulitkan proses administrasi dan pencatatan yang akurat, sementara minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan. Belum diterapkannya kolaborasi Satu Data juga mengakibatkan ketidakcocokan data antara instansi, yang berdampak pada kesulitan dalam memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran.

Di sisi lain, faktor pendukung pelaksanaan kebijakan ini cukup signifikan, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan kerjasama antar organisasi. Penggunaan teknologi seperti rekening bank untuk penyaluran bantuan dan pemanfaatan media sosial serta penyiaran radio mempermudah komunikasi dan transparansi. Kolaborasi antara Dinas Sosial dan Kantor Kecamatan juga memperlancar proses administrasi dan penyaluran bantuan, memastikan bahwa informasi dan verifikasi data lebih akurat. Kerjasama ini membantu dalam mengatasi masalah identitas penerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan sosial mencapai masyarakat yang tepat.

Sebagai upaya untuk mendorong implementasi yang lebih baik, pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah strategis. Sosialisasi mengenai persyaratan pendaftaran dan

pentingnya memiliki E-KTP dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bantuan sosial. Selain itu, kolaborasi antara Dinas Sosial dan Kantor Kecamatan diperkuat untuk memastikan pelaksanaan bantuan sosial yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas kebijakan bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan menarik lainnya dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala dalam pembaharuan data penduduk sering kali berdampak langsung pada efektivitas penyaluran bantuan sosial. Temuan ini menyoroti adanya kasus di mana masyarakat yang tidak layak menerima bantuan justru mendapatkannya, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan. Hal ini mencerminkan masalah dalam mekanisme verifikasi dan administrasi data, yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan akurasi dan relevansi data penduduk yang digunakan dalam program bantuan sosial. Ketidakakuratan data ini tidak hanya berdampak pada distribusi bantuan tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Temuan menarik lainnya adalah adanya hambatan signifikan terkait dengan ketersediaan E-KTP di Kabupaten Jayawijaya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan KTP lama, yang tidak kompatibel dengan sistem yang digunakan untuk administrasi bantuan sosial. Hambatan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dan program peningkatan kapasitas untuk mempercepat proses penerbitan E-KTP, sehingga setiap warga negara memiliki identifikasi yang valid dan dapat memanfaatkan layanan publik dengan lebih efektif. Pengadaan E-KTP secara menyeluruh juga dapat meningkatkan akurasi data penduduk yang sangat penting untuk berbagai program pemerintah lainnya.

Adapun perbandingan antara hasil penelitian penulis dan penelitian sebelumnya yakni dalam pelaksanaan bantuan sosial pada penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kemiskinan umumnya dipengaruhi faktor penghambatnya seperti rendahnya pemahaman masyarakat dalam tertib administrasi, perbedaan persepsi tentang standar kemiskinan di tingkat pusat dan daerah serta sinkronisasi data masyarakat miskin. Umumnya faktor penghambat memiliki perbedaan sesuai situasi dan kondisi setiap daerah. yang membedakan faktor penghambatnya di Kabupaten Jayawijaya adalah kurangnya koordinasi antara organisasi yang menangani bantuan sosial sehingga dalam pengurusan administrasi masih terdapat hambatan.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penelitian ini, selain temuan utama terkait dengan pelayanan penerbitan E-KTP melalui layanan SIPELANDUKILAT, terdapat beberapa temuan menarik lain yang patut dibahas. Pertama, penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi teknologi dalam administrasi kependudukan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Sistem SIPELANDUKILAT memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara berbagai unit kerja dalam Dukcapil Kabupaten Bulungan, mengurangi kemungkinan kesalahan input data dan duplikasi data. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan waktu pemrosesan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keakuratan informasi pribadi mereka dalam E-KTP.

Kedua, temuan menarik lainnya adalah adopsi teknologi sebagai faktor kunci dalam mengatasi hambatan geografis dan demografis. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa

SIPELANDUKILAT memungkinkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau untuk mendapatkan layanan E-KTP dengan lebih mudah. Dengan adanya aksesibilitas yang ditingkatkan melalui teknologi, proses administrasi kependudukan dapat merata dan inklusif bagi semua warga negara, tanpa memandang lokasi atau kondisi geografis mereka.

Selain itu, temuan menarik lainnya adalah peran penting partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan efektivitas layanan publik. Melalui penggunaan SIPELANDUKILAT, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengajuan dan pemrosesan E-KTP mereka. Dengan adanya feedback langsung dari pemohon, Dukcapil Kabupaten Bulungan dapat terus memperbaiki dan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, temuan-temuan menarik ini tidak hanya memberikan wawasan tambahan mengenai potensi dan manfaat teknologi dalam administrasi kependudukan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam proses transformasi digital pemerintahan. Implikasi dari temuan-temuan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan hasil pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Jayawijaya dalam penanggulangan kemiskinan secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Dimensi organisasi pelaksana menunjukkan pemberdayaan yang baik, sedangkan dimensi anggaran masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian dalam pengalokasian anggaran. Meskipun peraturan pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP, masalah masih ada pada sumber daya manusia yang belum memadai, terutama dengan adanya kekurangan SDM akibat mutasi ASN. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan media dalam penyaluran bantuan sosial telah berjalan efektif, mendukung transparansi dan akurasi dalam distribusi bantuan.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial meliputi kurangnya fasilitas seperti kendaraan roda empat, minimnya sumber daya manusia di Dinas Sosial, dan belum adanya kolaborasi satu data antara organisasi pelaksana. Selain itu, terdapat juga masalah dengan penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria. Sementara itu, faktor pendukung seperti pemanfaatan teknologi dan kerjasama antar organisasi, termasuk dengan Kantor Camat dan Pos Indonesia, telah memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial, menunjukkan bahwa kolaborasi dan teknologi berperan penting dalam meningkatkan kinerja program bantuan sosial.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong implementasi kebijakan bantuan sosial meliputi sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan bantuan sosial, serta kolaborasi antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan Kantor Pos untuk mendukung penyaluran bantuan. Sosialisasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, sedangkan kerjasama antar organisasi dapat memperlancar proses penyaluran dan memastikan bantuan sampai ke pihak yang berhak. Kendati demikian, tantangan terkait data dan infrastruktur harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran untuk memperbaiki implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut: Pertama, penting untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Sosial dalam hal pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Implementasi SATU DATA yang konsisten dapat membantu memastikan bahwa anggaran yang disediakan sesuai dengan data yang valid, sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran dan lebih efektif.

Kedua, mengingat kondisi geografis dan topografi Kabupaten Jayawijaya yang dapat diakses melalui jalur darat dan udara, disarankan agar pemerintah daerah mengembangkan kebijakan yang memanfaatkan potensi lokal. Program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, seperti pengembangan sayur-sayuran, dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat Jayawijaya yang masih sulit didapatkan. Kebijakan ini dapat membantu mengatasi kemiskinan secara lebih holistik.

Ketiga, perlu adanya pembaharuan data secara berkala terkait penerima bantuan sosial dengan melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan. Proses ini akan memastikan bahwa penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan lebih tepat dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Jayawijaya dapat ditingkatkan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan dalam analisis sebagian besar berasal dari wawancara dan dokumen yang disediakan oleh instansi terkait, yang mungkin mengandung bias atau tidak mencakup semua perspektif yang relevan. Kedua, penelitian ini fokus pada Kabupaten Jayawijaya dan hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk daerah lain dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, keterbatasan dalam akses lapangan dan waktu penelitian dapat mempengaruhi kedalaman analisis, khususnya dalam hal verifikasi data dan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan secara menyeluruh. Ke depan, penelitian lanjutan yang mencakup lebih banyak daerah dan metode penelitian yang lebih beragam dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)

Arah masa depan penelitian ini dapat melibatkan beberapa langkah untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang implementasi kebijakan bantuan sosial di daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa. Penelitian selanjutnya dapat mencakup studi komparatif antara Kabupaten Jayawijaya dan daerah lain untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan sosial. Selain itu, penelitian dapat memasukkan teknik analisis yang lebih canggih seperti analisis data kuantitatif dan pemodelan sistem untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengembangan metodologi yang melibatkan survei lebih luas dan partisipasi masyarakat secara langsung juga dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk pembuat kebijakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.” *UNIMAL Press*, 1, 1–128.
- Bogdan & Taylor. (2013). Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Akidah melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam(ski) di Mts An-Nur Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. *Penelitian Kualitatif*, 66, 1–66.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*.
- Handayani, Sri Sumi. (2021). *Kemensos Tetapkan 9 Kriteria Masyarakat Penerima Bansos, Kamu Termasuk?* soloposnews. <https://news.solopos.com/kemensos-tetapkan-9-kriteria-masyarakat-penerima-bansos-kamu-termasuk-1198290>
- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–77. <https://10.0.131.165/jiwbp.v13i2.3329>
- Jubi.id. (2023). *Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jayawijaya minta perhatian pemda*. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jayawijaya minta perhatian pemda
- Kalender Akademik IPDN. (2023). “800.2-487 Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri 800.2-267 Tahun 2023 tentang Kalender Akademik”, Surat Keputusan, Sumedang: IPDN.
- Larasati, N. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang. *Repository Unair*. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/70487>
- Maniagasi, F. (2021). *Otsus dan Percepatan Kesejahteraan Papua*. Media Indonesia.
- Naftali. (2021). *5 Distrik di Jayawijaya Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrim*. Kawattimur.id. [https://kawattimur.id/2021/10/26/5-distrik-di-jayawijaya-masuk-kategori-kemiskinan-ekstrim/#:~:text=Wamena %28KT%29 – Sebanyak 5 Distrik yang ada,Wesaput%2C Distrik Asologaima%2C Distrik Usilimo%2C dan Distrik Wouma.](https://kawattimur.id/2021/10/26/5-distrik-di-jayawijaya-masuk-kategori-kemiskinan-ekstrim/#:~:text=Wamena%20KT%29%20–%20Sebanyak%205%20Distrik%20yang%20ada,Wesaput%2C%20Distrik%20Asologaima%2C%20Distrik%20Usilimo%2C%20dan%20Distrik%20Wouma.)
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Pradina Pustaka*.
- Regency, J., & Figures, I. N. (2024). *Kab. jayawijaya dalam angka*.
- Rira Nuradhawati. (2019). 152 *DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Rira Nuradhawati*. 2(1), 152–170.
- Rosmaida, R., Sudi, A., & Daud, Y. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tawalian. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i1.2075>

Worldbank. (n.d.). *Indonesia has eradicated nearly all extreme poverty*. Diambil 14 November 2023, dari <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/0955d9f5014ceb3500e390c58d3e12a6-0070012023/original/PA-Backward.pdf>

